

LAPORAN KINERJA KPKNL JAKARTA I TAHUN 2024



KATA PENGANTAR



Laporan Kinerja Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta I Tahun 2024 merupakan wujud pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja KPKNL Jakarta I pada Tahun 2024 dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan kekayaan negara, pelayanan penilaian, pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang kepada pengguna jasa. Laporan Kinerja disusun untuk melaksanakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petuniuk Teknis Penvusunan

Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja. Sejalan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Keuangan, KPKNL Jakarta I telah menerapkan *Balanced Scorecard* (BSC) sebagai instrumen manajemen kinerja.

Performa KPKNL Jakarta I dinilai berdasarkan pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis sesuai dengan Kontrak Kinerja Kepala KPKNL Jakarta I dengan Kepala Kanwil DJKN DKI Jakarta Tahun 2024. Berkaitan dengan hal tersebut, pengukuran kinerja dalam Laporan Kinerja Tahun 2024 ini adalah berdasarkan hasil capaian kinerja IKU berbasis BSC. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun 2024, diperoleh rata-rata capaian IKU Kemenkeu *Three* KPKNL Jakarta I Tahun 2024 sebesar 112,44%.

Laporan Kinerja Tahun 2024 ini disusun dengan harapan dapat memberikan gambaran yang jelas dan transparan sekaligus sebagai pertanggungjawaban atas pencapaian visi dan misi KPKNL Jakarta I dalam mendukung pencapaian visi dan misi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Kepala Kantor,



Ditandatangani secara elektronik
Rofii Edy Purnomo



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Tugas, Fungsi dan Struktur KPKNL Jakarta I	1
B. Peran Strategis KPKNL Jakarta I	8
C. Sistematika Laporan	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA	12
A. Penetapan/ Perjanjian Kinerja	12
B. Pengukuran Kinerja	14
C. Adendum Kinerja	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	16
A. Capaian Kinerja Organisasi	16
B. Kinerja Lainnya	41
C. Realisasi Anggaran	43
BAB IV PENUTUP	45
LAMPIRAN	47
A. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	
B. Adendum Tahun 2024	
C. Struktur Organisasi	

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja KPKNL Jakarta I Tahun 2024 merupakan alat penilaian kinerja secara kuantitatif dan perwujudan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi DJKN menuju *good governance* yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Laporan Kinerja KPKNL Jakarta I Tahun 2024 merupakan bahan monitoring dan evaluasi dalam rangka pencapaian visi yang berpegang teguh pada visi DJKN yaitu ***“Menjadi Pengelola Kekayaan Negara yang Profesional dan Akuntabel dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan: Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan, serta untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”***

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, KPKNL Jakarta I mempunyai 5 misi yaitu:

1. Mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara;
2. Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum;
3. Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan kekayaan negara;
4. Menghasilkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan; dan
5. Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

Atas dasar visi dan misi yang telah ditetapkan, maka KPKNL Jakarta I mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang. Dalam menjalankan tugas, KPKNL Jakarta I menyelenggarakan fungsi, sebagai berikut:

1. Inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, pengamanan kekayaan negara;
2. Registrasi, verifikasi dan analisa pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan negara;
3. Pelaksanaan pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara;

4. Pelaksanaan bimbingan teknis, pembinaan, penatausahaan, penagihan dan optimalisasi dalam rangka pengelolaan piutang negara;
5. Pelaksanaan pelayanan penilaian;
6. Pelaksanaan pelayanan lelang;
7. Penyajian informasi di bidang kekayaan . negara, penilaian, dan lelang;
8. Pelaksanaan pemberian pertimbangan dan advokasi pengurusan piutang negara dan lelang;
9. Verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang; dan
10. Pelaksanaan administrasi KPKNL.

Penilaian terhadap keberhasilan atau kegagalan pencapaian strategis diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU). Kualitas IKU didasarkan pada kriteria SMART-C (*Specific, Measureable, Agreeable, Realistic, Time-bounded, dan Continuously Improved*). Pada tahun 2024 terdapat 11 (sebelas) Sasaran Strategis dan 19 (sembilan belas) Indikator Kinerja yang merupakan kontrak kinerja antara Kepala KPKNL Jakarta I dengan Kepala Kanwil DJKN DKI Jakarta. Secara umum pencapaian IKU pada Tahun 2024 sudah sesuai dengan target yang ditetapkan, terdapat 1 (satu) IKU yang berada di bawah target yaitu Persentase Realisasi Pokok Lelang.

KPKNL Jakarta I tidak akan berpuas diri dengan hasil yang telah diraih di Tahun 2024. Upaya-upaya perbaikan terus dilakukan untuk meningkatkan kinerja. Capaian IKU yang masih dibawah target terus dilakukan evaluasi dan rencana aksi yang relevan. KPKNL Jakarta I akan terus bekerja dengan semangat nilai-nilai Kementerian Keuangan Integritas, Profesional, Sinergi, Pelayanan, dan Kesempurnaan, untuk mencapai hasil yang lebih baik lagi dan senantiasa meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada pengguna jasa.

Kepala Kantor,



Ditandatangani secara elektronik
Rofii Edy Purnomo



BAB I – PENDAHULUAN

A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

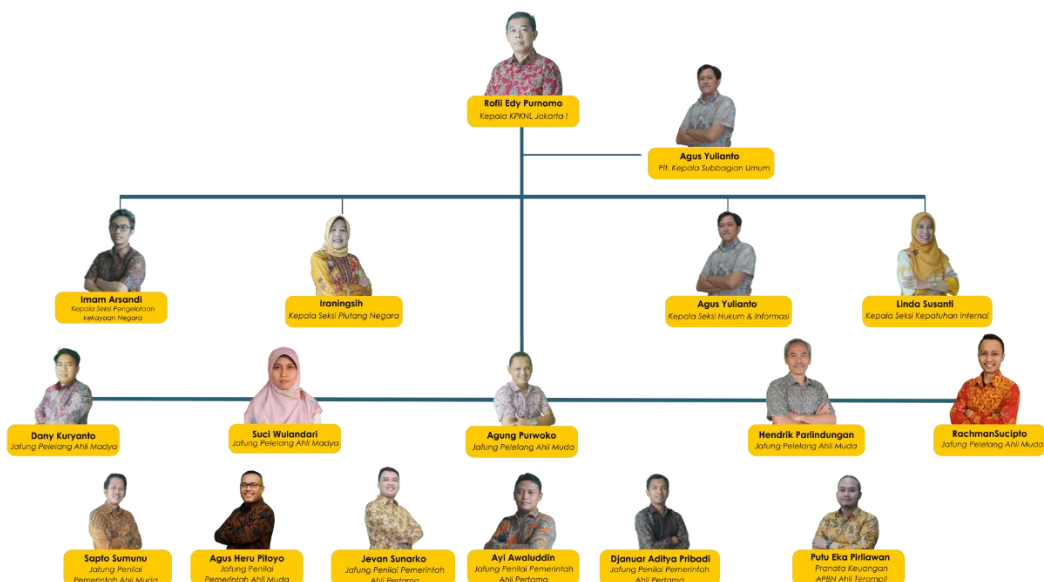
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta I merupakan unit Eselon III di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, disebutkan bahwa KPKNL merupakan unit instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Sebagai unit instansi vertikal, KPKNL melaksanakan tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang. Dalam melaksanakan tugasnya, KPKNL Jakarta I menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, pengamanan kekayaan negara;
2. Registrasi, verifikasi dan analisa pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan negara;
3. Pelaksanaan pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara;
4. Pelaksanaan bimbingan teknis, pembinaan, penatausahaan, penagihan dan optimalisasi dalam rangka pengelolaan piutang negara;
5. Pelaksanaan pelayanan penilaian;
6. Pelaksanaan pelayanan lelang;
7. Penyajian informasi di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang;
8. Pelaksanaan pemberian pertimbangan dan advokasi pengurusan piutang negara dan lelang;

9. Verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang; dan
10. Pelaksanaan administrasi KPKNL.

Susunan organisasi KPKNL Jakarta I adalah sebagai berikut :



Keterangan:

- | | |
|--|---------------------|
| Kepala Kantor | : Rofii Edy Purnomo |
| Plt. Kasubbag Umum | : Agus Yulianto |
| Kasi Pengelolaan Kekayaan Negara | : Imam Arsandi |
| Kasi Piutang Negara | : Iraningsih |
| Kasi Hukum dan Informasi | : Agus Yulianto |
| Kasi Kepatuhan Internal | : Linda Susanti |
| dan Para Kelompok Jabatan Fungsional (Jafung) | |

Sumber daya manusia yang ada di lingkungan KPKNL Jakarta I per tanggal 31 Desember 2024 berjumlah 37 pegawai dengan komposisi sebagai berikut:

1. Berdasarkan Golongan dan Pendidikan

TINGKAT PENDIDIKAN	GOLONGAN				JUMLAH
	I	II	III	IV	
S3	-	-	-	-	-
S2	-	-	4	7	11
S1/D IV	-	-	17	-	17
D III	-	2	4	-	6
SLTA/D I	-	-	3	-	3
SLTP	-	-	-	-	-
SD	-	-	-	-	-
TOTAL	-	2	28	7	37

2. Berdasarkan Gender

JENIS KELAMIN	Golongan				JUMLAH
	I	II	III	IV	
Perempuan	-	-	11	3	14
Laki-laki	-	2	17	4	23
TOTAL	-	2	28	7	37

3. Tenaga Fungsional

	Jabatan Fungsional	Jumlah
1.	Fungsional Pelelang	5
	Fungsional Pelelang Ahli Madya	2
	Fungsional Pelelang Ahli Muda	3
	Fungsional Pelelang Ahli Pertama	-
2.	Fungsional Penilai Pemerintah	5
	Fungsional Penilai Pemerintah Ahli Muda	2
	Fungsional Penilai Pemerintah Ahli Pertama	3
3.	Fungsional Pranata Keuangan APBN	1
	Fungsional Pranata Keuangan APBN Ahli Terampil	1
4.	Juru Sita Piutang Negara	2
5.	Pemeriksa Piutang Negara	2

Tugas dan Fungsi KPKNL Jakarta I berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 9/KN/2017 tentang Pembagian Tugas pada Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara:

1. Pengelolaan Kekayaan Negara

A. Pengelolaan Barang Milik Negara atas Kementerian Negara/Lembaga Negara/ Badan atau Komisi di wilayah Provinsi DKI Jakarta, yang meliputi:

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat
2. Dewan Perwakilan Rakyat
3. Mahkamah Agung
4. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
5. Kementerian Luar Negeri
6. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
7. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
8. Kementerian Perhubungan
9. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional
10. Kementerian Pemuda dan Olahraga
11. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
12. Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional
13. Badan Koordinasi Penanaman Modal
14. Badan Narkotika Nasional
15. Badan Pengawas Pemilihan Umum
16. Badan Tenaga Nuklir Nasional
17. Komisi Pemilihan Umum
18. Ombudsman Republik Indonesia

B. Pengelolaan Kekayaan Negara Lain-Lain di wilayah Provinsi DKI Jakarta, yang meliputi:

1. Barang Rampasan Negara Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat
2. Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa (ABMA/T) Jakarta Pusat
3. Hak atas kekayaan intelektual
4. Benda Cagar Budaya yang belum ditetapkan statusnya sebagai BMN
5. Aset eks. Bank Dalam Likuidasi

C. Pengelolaan Barang Milik Negara pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di wilayah Kota Jakarta Pusat

2. Pelayanan Penilaian

A. Objek Penilaian yang berada di wilayah Provinsi DKI Jakarta atas:

1. Permohonan penilaian dan analisis yang terpisah untuk Barang Milik Negara dan kekayaan negara lain-lain sesuai pembagian lingkup/wilayah kerja pengelolaan kekayaan negara KPKNL Jakarta I.
 2. Permohonan penilaian dalam rangka pengurusan piutang negara sesuai pembagian lingkup/wilayah kerja pengurusan piutang negara KPKNL Jakarta I.
 3. Permohonan penilaian dan analisis yang terpisah untuk Barang Milik Negara dan Kekayaan Negara Lain-Lain yang berasal dari Kementerian/Lembaga Negara/Badan atau Komisi lingkup Pengelolaan Kekayaan Negara KPKNL Jakarta I yang berdomisili di luar wilayah Provinsi DKI Jakarta.
- B. Objek Penilaian yang berada di wilayah Kota Jakarta Pusat atas permohonan penilaian dan analisis yang terpisah berupa:
1. Sumber Daya Alam
 2. Kekayaan Negara yang Dipisahkan
 3. Penilaian lainnya dalam rangka pengelolaan kekayaan negara
 4. Sitaan pajak
 5. Barang Milik Daerah/ Kekayaan Daerah
 6. aset Badan Usaha Milik Negara/Daerah
 7. aset lembaga/badan hukum non swasta lainnya
 8. sitaan kepolisian/Penyidik Pegawai Negeri Sipil
3. Pengurusan Piutang Negara
- Pengurusan Piutang Negara di wilayah Provinsi DKI Jakarta yang berasal dari Penyerah Piutang:
- a. Majelis Permusyawaratan Rakyat
 - b. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman
 - c. Kementerian Sekretariat Negara
 - d. Kementerian Luar Negeri
 - e. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
 - f. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional
 - e. Kementerian Badan Usaha Milik Negara
 - f. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

- g. Badan Intelijen Negara
- h. Badan Pengawas Tenaga Nuklir
- i. Badan Pusat Statistik
- j. Badan Standardisasi Nasional
- k. Badan Siber dan Sandi Negara
- l. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
- m. Komisi Pemilihan Umum
- n. Komisi Pengawas Persaingan Usaha
- o. Lembaga Administrasi Negara
- p. Lembaga Penerbangan Dan Antariksa Nasional
- q. Ombudsman Republik Indonesia
- r. DJKN [Piutang Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS)
eks.penanganan Kejaksaan
- s. Aset kredit eks BPPN yang berasal dari:
 - Bank Surya
 - Bank Hokindo
 - Bank Subentra
 - Bank Umum Nasional
 - Bank Danamon Indonesia
 - Bank Bali
 - Bank Risjad Salim Internasional
 - Bank PDFCI
 - Bank Niaga
 - Bank Pos Nusantara
 - Bank Sewu International
 - Bank Sanho
 - Bank Dharmala
 - Bank Ciputra
 - Bank Indonesia Raya
 - Bank Danahutama
 - Bank Central Dagang
 - Bank Budi International

- Bank Orient
- Bank Sahid Gajah Perkasa
- Bank Dana Asia
- Bank Yakin Makmur
- Bank Namura Internusa
- Bank Tata
- Bank Pesona Kridayana
- Bank Putra Surya Perkasa
- Bank Mashill Utama
- Bank Baja International
- Bank Bumi Raya Utama
- Bank Bumi Daya
- Bank Dagang Negara
- Bank Ekspor Impor Indonesia
- Bank Pembangunan Indonesia
- Bank Negara Indonesia
- Bank Tabungan Negara
- Bank Mandiri
- Bank Universal
- Bank Jaya International
- Bank Perniagaan Umum
- Bank Pertiwi
- Bank Overseas Express
- Bank Permata
- Bank Prima Ekspres

t. Pemda DKI Jakarta

4. Pelayanan Lelang

A. Objek lelang yang berada di wilayah Provinsi DKI Jakarta atas Permohonan

Lelang:

1. Eksekusi PUPN dari KPKNL Jakarta I
2. Balai Lelang

3. Pengadilan Negeri/Pengadilan Agama/Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat
4. Lingkup Kanwil DJP Jakarta Pusat
5. Lingkup Kanwil DJP WP Besar
6. Harta Pailit/Kurator domisili di Jakarta Pusat
7. Hak Tanggungan Kreditur:
 - a. PT Bank Mandiri
 - b. PT Bank Syariah Mandiri
 - c. Standard Chartered Bank
 - d. Bank Perkreditan Rakyat
 - e. Bank Perkreditan Rakyat Syariah
 - f. PT Bank OCBC NISP
8. Fidusia domisili Kreditur di Jakarta Pusat
9. Kementerian/ Lembaga Negara, Badan Layanan Umum, dan Pemohon Lelang lainnya yang termasuk dalam Pengelolaan Kekayaan Negara Jakarta I
10. Bank Indonesia
11. Pemerintah Daerah domisili di Jakarta Pusat
12. Badan Usaha Milik Negara/Daerah domisili di Jakarta Pusat
13. Balai Harta Peninggalan
14. Sukarela domisili Pemohon di Jakarta Pusat
15. Bank Dalam Likuidasi domisili di Jakarta Pusat
16. Pemohon Lelang domisili di luar Provinsi DKI Jakarta

B. Peran Strategis

Sebagai organisasi yang memiliki fungsi pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang, KPKNL Jakarta I memiliki peran strategis sebagai berikut:

1. Melakukan pengelolaan kekayaan negara;

Sebagai pengelola kekayaan negara, KPKNL Jakarta I turut berperan dalam mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna kekayaan negara. Peningkatan

daya guna dan hasil guna terutama difokuskan pada pemanfaatan kekayaan negara, pengamanan kekayaan negara dan penatausahaan kekayaan negara. Selain itu KPKNL Jakarta I selaku *asset manager* mengemban tugas menata manajemen aset negara dan menjadikan aset sebagai salah satu indikator peningkatan efektivitas APBN, yaitu melalui optimalisasi aset dalam peningkatan pendapatan negara dan penghematan belanja modal dan belanja pemeliharaan.

2. Memberikan pelayanan pengurusan Piutang Negara;

Pengurusan piutang negara bertujuan untuk mengamankan keuangan negara dengan melakukan penagihan dan pengurusan piutang macet yang berasal dari instansi pemerintah dan badan-badan usaha yang dikuasai oleh negara baik secara langsung maupun tidak langsung berdasarkan perjanjian, peraturan perundangan dan sebab apapun. Sejak berlaku Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006, piutang macet yang berasal dari BUMN perbankan, pengurusannya tidak lagi diserahkan kepada PUPN. Dengan terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-IX/2011 tanggal 25 September 2012, pengurusan piutang negara difokuskan kepada piutang negara instansi pemerintah.

3. Memberikan pelayanan lelang;

Pelayanan lelang bertujuan untuk menjadikan lelang sebagai sarana transaksi penjualan aset secara umum, sebagaimana fungsi pasar pada umumnya. KPKNL Jakarta I tidak hanya melaksanakan lelang eksekusi tetapi juga melaksanakan lelang sukarela. Lelang mempunyai manfaat nilai lebih dibandingkan dengan transaksi jual beli biasa, yaitu lebih transparan, akuntabel, efisien dan dapat menjamin kepastian hukum. Risalah Lelang yang merupakan akta otentik berfungsi sebagai *Akta van Transport* untuk kepentingan peralihan hak. KPKNL Jakarta I diharapkan dapat berperan menjadi akselerator agar paradigma lelang meresap ke dalam pola pikir masyarakat, bahwa lelang adalah instrumen jual beli yang menguntungkan, sehingga berperan dalam menggerakkan perekonomian masyarakat.

4. Memberikan kontribusi pemasukan PNBPN ke Kas Negara

Biaya Administrasi (Biad) Pengurusan Piutang Negara merupakan hasil dari pelayanan pengurusan piutang negara yang diterima oleh KPKNL. Sedangkan dalam memberikan pelayanan lelang, KPKNL memperoleh hasil berupa Bea Lelang termasuk Bea Lelang Pegadaian. Kedua penerimaan tersebut selanjutnya disetorkan ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

C. Permasalahan Utama yang Berkaitan dengan Pencapaian Kinerja

Pada pelaksanaan kegiatan, secara umum pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Tahun 2024 telah sesuai dengan yang ditargetkan dan banyak diantaranya mencapai nilai di atas 100%. Meskipun pada pencapaian target tersebut dapat beberapa persoalan/ permasalahan utama yang dihadapi dalam pencapaian sasaran dimaksud antara lain:

1. Belum ada kekuatan hukum terhadap Satuan Kerja (Satker) yang melakukan pemanfaatan BMN tanpa melalui persetujuan Pengelola Barang.
2. Minimnya kesadaran Satker terkait tertib administrasi dan terkait pengoptimalan Barang Milik Negara (BMN).
3. Kondisi perekonomian masih dalam keadaan yang tertekan, *marketability* dan barang yang dilelang memiliki masalah hukum.
4. Hasil lelang hak tanggungan, lelang Harta Pailit dan lelang sitaan Pengadilan sebagian besar tidak ada penawaran karena obyek lelang tidak *marketabel*, obyek lelang masih dihuni oleh debitur/pemilik jaminan/pihak lain, nilai limit tinggi dan kurang peminat.
5. Masih adanya keraguan pembeli lelang untuk membeli melalui lelang.
6. Dokumen kepemilikan tanah Satker yang menjadi objek sertifikasi belum lengkap.
7. Terdapat BMN berupa tanah yang masih dalam sengketa.
8. Sebagian besar piutang negara tidak didukung barang jaminan dan alamat debitur tidak sesuai dengan alamat penyerahan, sehingga keberadaannya sulit diketahui dan perusahaan sudah dipailitkan dan dilikuidasi.

9. Beberapa usulan diklat pegawai pada aplikasi Diklat tidak diproses oleh Kepegawaian, sehingga beberapa pegawai tidak mendapat panggilan diklat selama tahun berjalan.

D. Sistematika Laporan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja KPKNL Jakarta I Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan

Bagian ini menguraikan tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi, dan peran strategis, serta sistematika laporan.

2. Bab II Perencanaan Kinerja

Bagian ini menguraikan tentang ringkasan penetapan/perjanjian kinerja, metode yang digunakan dalam mengukur kinerja tahun 2024 serta adendum kinerja.

3. Bab III Akuntabilitas Kinerja

Bagian ini menguraikan tentang capaian kinerja beserta analisisnya dibandingkan capaian tahun sebelumnya dan uraian atas realisasi anggaran yang digunakan.

4. Bab IV Penutup

Bagian ini menguraikan tentang simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja.

BAB II - PERENCANAAN KINERJA

A. Penetapan/ Perjanjian Kinerja

Penetapan/Perjanjian Kinerja sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Untuk menjamin tercapainya sasaran dan target secara optimal, visi dan misi KPKNL Jakarta I menjadi acuan sekaligus landasan penyusunan strategi. Visi dan misi tersebut kemudian dirumuskan Sasaran Strategis (SS) sebagaimana tertuang dalam Peta Kinerja Nomor PK- 01/WKN.07/2024.

Sasaran Strategis KPKNL Jakarta I Tahun 2024 telah ditetapkan dan dikelompokkan sebagaimana tertuang dalam Peta Strategi KPKNL Jakarta I. Peta Strategi KPKNL Jakarta I Tahun 2024 memuat 11 Sasaran Strategis yaitu:

1. Pengelolaan Kekayaan Negara dan lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan.
2. Pengelolaan Kekayaan Negara yang memenuhi harapan pengguna jasa.
3. Pengelolaan Piutang Negara dan Lelang yang Optimal.
4. Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien.
5. Penerapan tata kelola Kekayaan Negara yang Efektif.
6. Penerapan tata kelola Piutang Negara dan Lelang yang Produktif.
7. Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional.
8. Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif.
9. Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel.
10. Komunikasi publik yang efektif.
11. Pengawasan dan Pengendalian Internal yang bernilai tambah.

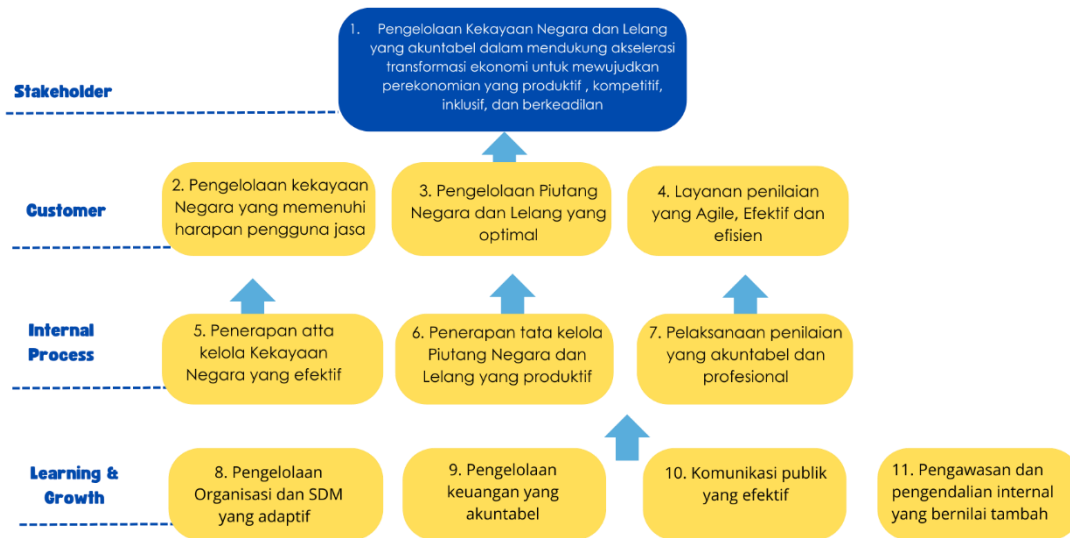
Peta strategi KPKNL Jakarta I mempunyai 4 perspektif, yaitu: *stakeholders perspective, customer perspective, internal process perspective dan learning and growth perspective*. Dari peta strategi KPKNL Jakarta I tahun 2024 tersebut untuk

mencapai 11 Sasaran Strategis telah diidentifikasi sebanyak 19 Indikator Kinerja Individu.

Rincian tentang Sasaran Strategis dan IKU Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan	1a-CP Tingkat Kepuasan Stakeholder dan Pengguna Layanan	100
		1b-CP Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100 (Rp116.5 M)
		1c-CP Indeks integritas	89.17
2	Pengelolaan Kekayaan Negara yang memenuhi harapan pengguna jasa	2a-CP Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	71,5
		2b-CP Tingkat efektivitas Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara	86.5
3	Pengelolaan Piutang Negara dan Lelang yang optimal	3a-CP Persentase realisasi pokok lelang	100 (Rp 450 M)
		3b-CP Persentase penurunan nilai outstanding Piutang Negara	75
4	Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien	4a-CP Indeks ketepatan waktu penyelesaian layanan penilaian	75
5	Penerapan tata kelola Kekayaan Negara yang efektif	5a-CP Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100
		5b-CP Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100
6	Penerapan tata kelola Piutang Negara dan Lelang yang produktif	6a-CP Persentase saldo BKPN	90 (540)
		6b-CP Persentase produktivitas lelang	89
7	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional	7a-CP Deviasi ketergunaan hasil penilaian	16
8	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	8a-N Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	85
		8b-N Persentase pengembangan kompetensi pegawai	90
9	Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel	9a-C Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100
		9b-CP Deviasi data PNBPN Fungsional DJKN	10
10	Komunikasi publik yang efektif	10a-N Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)	80
11	Pengawasan dan Pengendalian Internal yang bernilai tambah	11a-N Indeks efektivitas UKI	82

Peta Strategi



B. PENGUKURAN KINERJA

Dalam rangka mengukur capaian indikator kinerja, KPKNL Jakarta I berpedoman kepada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan. Pengukuran capaian IKU ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

1. Angka maksimum indeks capaian setiap IKU ditetapkan sebesar 120%
2. Indeks capaian IKU dikonversikan menjadi maximize semua agar sebanding dengan yang lain
3. IKU yang ditetapkan diupayakan realisasi pencapaiannya memungkinkan melebihi target
4. Untuk IKU yang capaiannya tidak memungkinkan melebihi target, maka capaiannya ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Apabila realisasi pencapaiannya sama dengan target, maka indeks capaian IKU tersebut dikonversi menjadi 120%.
 - b. Apabila realisasi pencapaiannya tidak memenuhi target, maka indeks capaian IKU tersebut tidak dilakukan konversi.

C. ADENDUM KINERJA

Dalam rangka penguatan implementasi sistem manajemen kinerja dan risiko organisasi di lingkungan DJKN, Sekretariat DJKN dengan Nota Dinas (ND) Nomor : ND-1794/KN.1/2024 tanggal 30 Mei 2024, menetapkan adendum Perjanjian Kinerja dan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Kepala KPKNL Jakarta I dalam bentuk perubahan *trajectory* IKU/IKI menjadi triwulanan, dan perubahan tersebut tertuang dalam adendum PK Nomor : 01A/WKN.07/2024 bulan Juni 2024. Memperhatikan ketentuan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, adendum target wajib dilakukan apabila capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) pada periode berjalan telah mencapai/melebihi target periode berikutnya, dan berdasarkan hasil monitoring Sekretariat DJKN, terdapat capaian IKU KPKNL Jakarta I yang telah mencapai/melebihi target periode berikutnya, sehingga wajib dilakukan adendum. Berdasarkan Nota Dinas Sekretaris DJKN nomor ND-4132/KN.1/2024 tanggal 8 November 2024, maka ditetapkan Adendum Perjanjian Kinerja KPKNL Jakarta I Nomor : 01B/WKN.07/2024 tanggal 20 November 2024.

BAB III - AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Rincian capaian kinerja atas 11 (sebelas) Sasaran Strategis dan 19 (sembilan belas) Indikator Kinerja (IKU) KPKNL Jakarta I Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Target	Realisasi	Indeks
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan			
1a-CP	Tingkat Kepuasan Stakeholder dan Pengguna Layanan	100	112,19	112,19
1b-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100 (Rp. 116,5 M)	110,39 (Rp. 128,6 M)	110,39
1c-CP	Indeks Integritas	82	92,44	103,67
2	Pengelolaan Kekayaan Negara yang memenuhi harapan pengguna jasa			
2a-CP	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN Dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	71,5	86,30	120
2b-CP	Tingkat efektivitas Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara	86,5	93,58	108,18
3	Pengelolaan Piutang Negara dan Lelang yang optimal			
3a-CP	Persentase realisasi pokok lelang	100 (Rp. 570,3 M)	91,23 (Rp. 520,3 M)	91,23
3b-CP	Persentase penurunan nilai outstanding Piutang Negara	100 (Rp. 697,64 M)	109,61 (Rp. 764,47 M)	109,61
4	Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien			
4a-CP	Indeks ketepatan waktu penyelesaian layanan Penilaian	75	96,33	120
5	Penerapan tata kelola Kekayaan Negara yang efektif			
5a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100	101,68	101,68
5b-CP	Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100	122,99	120
6	Penerapan tata kelola Piutang Negara dan Lelang yang produktif			
6a-CP	Persentase saldo BKPN	88	86,83	86,83
6b-CP	Persentase produktivitas lelang	89	89,66	89,66

7	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional			
7a-CP	Deviasi ketergunaan hasil penilaian	16	0,09	120
8	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif			
8a-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	85	99,33	116,86
8b-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	90	113,50	120
9	Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel			
9a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	120	120
9b-CP	Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN	10	0,09	120
10	Komunikasi publik yang efektif			
10a-N	Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)	80	116	120
11	Pengawasan dan Pengendalian Internal yang bernilai tambah			
11a-N	Indeks efektivitas UKI	82	99,76	120

SS.1 Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan

1. Tingkat Kepuasan Stakeholder dan Pengguna Layanan

K-Wide	SS.1 Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan							
	1. Tingkat Kepuasan Stakeholder dan Pengguna Layanan							
T/R	Q1	Q2	Smt.I	Q3	s.d.Q3	Q4	Y-24	Pol/ KP
Target	20%	50%	50%	70%	70%	100%	100%	Max /TLK
Realisasi	27,78%	83,33%	83,33%	83,33%	83,33%	112,19%	112,19%	
Capaian	120%	120%	120%	119,04%	119,04%	112,19%	112,19%	
Nilai Kinerja	120%	120%	120%	119,04%	119,04%	112,19%	112,19%	

	Tahun 2020-2022*)	Tahun 2023		Tahun 2024
		Komponen I	Komponen II	
Target	N/A	100% 5	100% 11	100%
Realisasi	N/A	4.43	11	112,19%
Persentase Capaian	N/A	106,40%		112,19%

Pengukuran IKU ini baru dilaksanakan mulai Tahun 2023. Pelaksanaan Survei Kepuasan Pemangku Kepentingan dan Pengguna Layanan Kemenkeu (SKPKPL) merupakan tolok ukur untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan Kementerian Keuangan kepada masyarakat, pengguna layanan dan *stakeholders*. Dalam menyelenggarakan survei, untuk menjamin independensi, Kementerian Keuangan bekerjasama dengan lembaga/tim peneliti independen penyelenggara survei untuk dapat memperoleh nilai atau angka berupa Indeks Kepuasan Pengguna Layanan (IKPL) dan Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (IKPK) serta penyelesaian rekomendasi perbaikan pada masing-masing Unit Eselon I/LNSW berdasarkan survei yang dilakukan pada kota-kota yang ditunjuk untuk dapat menggambarkan pelayanan Kemenkeu secara keseluruhan.

Dibandingkan Tahun 2023, terdapat perbedaan komponen perhitungan pada IKU ini. Tahun 2023 hanya menetapkan 2 komponen perhitungan yaitu Indeks Kepuasan Pengguna Layanan DJKN dan Penyelesaian tindak lanjut rekomendasi, sementara pada tahun 2024, IKU Indeks Kepuasan *Stakeholder* dan Pengguna Layanan terdiri dari 3 komponen, yaitu:

1. Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan/*Stakeholder* (IKPK)
2. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan (IKPL)
3. Tingkat Penyelesaian tindak lanjut rekomendasi SKPL 2023.

KPKNL Jakarta I telah melakukan beberapa langkah diantaranya menyampaikan daftar responden sesuai kriteria ke Sekretariat Direktorat Jenderal (Sesditjen), publikasi dan sosialisasi standar pelayanan pada berbagai saluran serta melaksanakan internalisasi terkait *service excelent*. Rencana aksi yang akan dilakukan di tahun berikutnya KPKNL Jakarta I akan melaksanakan petunjuk dari kantor Pusat DJKN terkait tindaklanjut SKPL, setelah dilakukan reвью oleh unit terkait.

2. Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang

K-Wide	SS.1 Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan							
	2.Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang							
T/R	Q1	Q2	Smt.I	Q3	s.d.Q3	Q4	Y-24	Pol/ KP
Target	100% Rp.10.745 M	100% Rp. 39,870 M	100% Rp. 39,870 M	100% Rp. 82,780 M	100% Rp. 82,780 M	100% Rp 116,500 M	100% Rp 116,500 M	Max
Realisasi	Rp. 10,595 M	Rp. 53,169 M	Rp. 53,169 M	Rp 84,478 M	Rp 84,478 M	Rp 128,601 M	Rp 128,601 M	/TLK
Capaian	98,61%	120%	120%	102,05%	102,05%	110,39%	110,39%	
Nilai Kinerja	98,61%	120%	120%	102,05%	102,05%	110,39%	110,39%	

	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
Target	100% (Rp46.595.194.894,02)	100% (Rp80.035.000.000)	100% (Rp89.122.000.000) kemudian terdapat adendum sehingga target menjadi Rp91.622.000.000)
Realisasi	179,41% (Rp83.596.300.898)	147,73% (Rp118.231.592.390)	179,41%(Rp180.314.391.844)
Persentase capaian	179,41%	147,73%	179,41%

	Tahun 2023	Tahun 2024
Target	100% (Rp131.820.038.927)	100% (Rp. 116.500.000.000)
Realisasi	129,08% (131.820.038.927)	110,39% (Rp. 128.601.714.975)
Persentase capaian	129,08%	110,39%

Realisasi IKU Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang pada tahun 2024 adalah sebesar Rp. 128.601.714.975. IKU ini mulai diukur kinerjanya pada tahun 2017. Realisasi tersebut didapat dari :

1. Realisasi nominal PNBP Aset sebesar Rp. 102.565.665.685,00
2. Realisasi nominal PNBP PN sebesar Rp. 8.198.519.768,00
3. Realisasi nominal PNBP Lelang sebesar Rp. 17.837.529.522,00

KPKNL Jakarta I melakukan beberapa upaya diantaranya mengolah data penerimaan PNBP yang diperoleh dari KPPN dan bendahara penerimaan KPKNL Jakarta I, melakukan koordinasi dengan satker untuk mengajukan pemanfaatan aset BMN yang ada di lingkungan Satker, mengelola Piutang Negara secara optimal, baik melalui penagihan,

eksekusi barang jaminan/ harta kekayaan lain, peningkatan pengurusan Penetapan Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT), maupun pengembalian Piutang negara sesuai dengan ketentuan serta berkoordinasi dengan pengguna jasa lelang untuk melakukan lelang terhadap barang-barang dengan *marketability* yang tinggi. Pada tahun mendatang, rencana yang akan dilakukan yaitu melakukan koordinasi dengan *Stakeholder* lelang untuk mengoptimalkan pelaksanaan Agunan yang Diambil Alih (AYDA).

3. Indeks Integritas

K-Wide	SS.1 Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan							
	3. Indeks Integritas							
T/R	Q1	Q2	Smt.I	Q3	s.d.Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	10	20	20	30	30	89,17	89,17	Max/TLK
Realisasi	10	20	20	30	30	92,44	92,44	
Capaian	100%	100%	100%	100%	100%	103,67%	103,67%	
Nilai Kinerja	100%	100%	100%	100%	100%	103,67%	103,67%	

	Tahun 2020-2022*)	Tahun 2023	Tahun 2024
Target	N/A	88,67	89,17
Realisasi	N/A	89,17	92,44
Persentase capaian	N/A	100,56%	103,67%

Pengukuran IKU ini dimulai sejak Tahun 2023. Realisasi IKU Indeks Integritas Tahun 2024 adalah 92,44 dengan persentase capaian sebesar 103,67%. Pencapaian IKU Indeks Integritas terdiri dari 3 komponen yaitu :

Komponen Penilaian A = Hasil Survei dan FGD Komponen Penilaian

Komponen Penilaian B = Faktor Koreksi, yaitu **(1)** Ketersediaan OTT/Fraud **(2)** Hasil Audit Investigasi **(3)** Pengondisian **(4)** Informa

Komponen Penilaian C = Apresiasi, yaitu **(1)** Penilaian atas Realisasi Rencana Aksi Perbaikan dari Hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) **(2)** Penilaian atas Kegiatan Pencegahan di UE

KPKNL Jakarta I memenuhi *action plan* hasil SPI 2023, dari 10 action plan telah terlaksana 14 action plan serta publikasi pelaksanaan SPI 2024. Kedepannya akan dilaksanakan internalisasi terkait integritas secara berkala pada KPKNL Jakarta I.

SS.2 Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa

4. Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK)

K-Wide	SS.2 Pengelolaan Kekayaan Negara Yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa							
	4. Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK							
T/R	Q1	Q2	Smt.I	Q3	s.d.Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	30%	50%	50%	60%	60%	71,50%	71,50%	Max/ TLK
Realisasi	30%	96,37%	96,37%	91,33%	91,33%	86,30%	86,30%	
Capaian	100%	192,74%	192,74%	151,88%	151,88%	120,70%	120,70%	
Nilai Kinerja	100%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Target	100% (99 NUP)	62% (273 NUP)	65% (464 NUP)	68%	71,50%
Realisasi	100% (99 NUP)	78,86% (274 NUP)	83,63% (464 NUP)	85,94%	86,30%
Persentase capaian	100%	127,2%	128,7%	126,38%	120,70%

IKU Tingkat kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK mulai diukur kinerjanya pada tahun 2020. Formula penghitungan IKU ini di Tahun 2024 masih sama dengan formula tahun lalu, yaitu melingkupi perhitungan Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK dan optimalisasi SBSK. Realisasi IKU Tingkat kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK pada tahun 2024 adalah sebesar 120,70 %. KPKNL Jakarta I terus melakukan

koordinasi dengan unit terkait baik dari internal DJKN maupun pada satker KPKNL Jakarta I dalam pencapaian kinerjanya. Hal ini akan terus dilakukan juga pada rencana tahun mendatang.

5. Tingkat Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara

K-Wide		SS.2 Pengelolaan Kekayaan Negara Yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa						
		5. Tingkat efektivitas Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara						
T/R	Q1	Q2	Smt.I	Q3	s.d.Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	10%	45%	45%	60%	60%	86,50%	86,50%	Max/ TLK
Realisasi	10%	58,44%	58,44%	66,27%	66,27%	93,58%	93,58%	
Capaian	100%	129,87%	129,87%	110,45%	110,45%	108,18%	108,18%	
Nilai Kinerja	100%	120%	120%	110,45%	110,45%	108,18%	108,18%	

	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Target	80%	85%	85%	86%	86,50%
Realisasi	82%	100%	97,77%	88,60%	93,58%
Persentase capaian	102,5%	117,65%	115,02%	103,02%	108,18%

Realisasi Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan aset pada Tahun 2024 adalah sebesar 93,58%, yakni telah menindaklanjuti 204 dari 218 persetujuan pengelolaan BMN yang telah diterbitkan sepanjang Semester II Tahun 2023 dan Semester I Tahun 2024, dengan rincian : 23 dari 23 persetujuan penggunaan BMN, 67 dari 75 persetujuan pemanfaatan BMN, serta 114 dari 120 persetujuan pemindahtanganan BMN. Capaian tersebut telah melampaui target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 86,5%. Pengukuran kinerja IKU ini dapat tercapai dikarenakan KPKNL Jakarta I rutin melakukan pembinaan pada satker baik secara tertulis maupun lisan.

SS.3 Pengelolaan Piutang Negara dan Lelang yang Optimal

6. Presentase Realisasi Pokok Lelang

K-Wide	SS.3 Pengelolaan Piutang Negara dan Lelang yang optimal							
	6. Presentase Realisasi Pokok Lelang							
T/R	Q1	Q2	Smt.I	Q3	s.d.Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	100% Rp.28,51M	100% Rp.171,09M	100% Rp.171,09M	100% Rp.399,21M	100% Rp.399,21M	100% Rp.570,30M	100% Rp.570,30M	Max / TLK
Realisasi	429,38% Rp.122,43M	107,28% Rp.183,54M	107,28% Rp.183,54M	77,97% Rp.311,26M	77,97% Rp.311,26M	91,23% Rp.520,31M	91,23% Rp.520,31M	
Capaian	429,38%	107,28%	107,28%	77,97%	77,97%	91,23%	91,23%	
Nilai Kinerja	120%	107,28%	107,28%	77,97%	77,97%	91,23%	91,23%	

	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Target	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	121,43%	121,95%	148,52%	72,20%	91,23%
Persentase capaian	121,43%	121,95%	148,52	72,20%	91,23%

Realisasi Persentase Hasil Lelang (Pokok Lelang) pada Tahun 2024 adalah 91,23%. Pencapaian tersebut lebih rendah dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 100%. IKU Realisasi Persentase Hasil Lelang (Pokok Lelang) merupakan gabungan dari Target/realisasi pokok lelang kelas I dan Target/realisasi pokok lelang pegadaian. Perhitungan pencapaian IKU ini pada tahun 2024 menggunakan formula:

$$\frac{\sum \text{Realisasi Pokok Lelang KPKNL (PL I) + Pegadaian + Pokok Lelang PL II}}{\text{Target Pokok Lelang KPKNL (PL I) + Pegadaian + Pokok Lelang PL II}}$$

Adapun rincian pencapaian sub-sub IKU tersebut adalah sebagai berikut:

a. Jumlah Pokok Lelang Kelas I

	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
Target	Rp360.000.000.000	Rp383.000.000.000	Rp388.000.000.000
Realisasi	Rp483.308.581.132	Rp416.604.964.000	Rp576.539.889.492
Persentase capaian	134%	109%	148,59%

	Tahun 2023	Tahun 2024
Target	Rp390.000.000.000	Rp. 420.300.000.000
Realisasi	Rp229.301.640.834	Rp. 387.184.572.491
Persentase capaian	58,79%	92,12%

Realisasi Jumlah Pokok Lelang Kelas I pada Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 387.184.572.491 atau tidak melampaui target yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp. 420.300.000.000.

b. Jumlah Pokok Lelang Pegadaian.

	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
Target	Rp98.200.000.000	Rp94.000.000.000	Rp80.000.000.000
Realisasi	Rp73.089.188.300	Rp165.080.089.000	Rp118.551.458.600
Persentase capaian	74%	176%	148,19%

	Tahun 2023	Tahun 2024
Target	Rp. 80.000.000.000	Rp. 150.000.000.000
Realisasi	Rp. 110.058.048.300	Rp. 133.127.707.100
Persentase capaian	137,57%	88,75%

Realisasi Jumlah Pokok Lelang Pegadaian pada Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 133.127.707.100. Pencapaian tersebut belum memenuhi target yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp 150.000.000.000.

Dalam pencapaian kinerja, KPKNL Jakarta I terus menggali potensi lelang dan berupaya berkoordinasi dengan satuan kerja atau pemohon lelang dan juga perbankan. Kedepannya, KPKNL Jakarta I Menghimbau pemohon lelang untuk mengajukan permohonan dengan memprioritaskan objek lelang yang berstatus *free & clear* serta

marketable, menetapkan nilai limit berdasarkan laporan penilaian yang masih berlaku dengan memperhatikan potensi daya laku, melakukan pemsaran obyek lelang secara intensif, melakukan AYDA (bagi kreditur perbankan) serta menetapkan nilai limit 50% untuk lelang noneksekusi BMN/D.

7. Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara

K-Wide	SS.3 Pengelolaan Piutang Negara dan Lelang yang optimal							
	7. Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara							
T/R	Q1	Q2	Smt.I	Q3	s.d.Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	100% Rp. 67,5 M	100% Rp. 180 M	100% Rp. 180 M	100% Rp. 315 M	100% Rp. 315 M	100% Rp. 647,64 M	100% Rp. 647,64 M	Max/ TLK
Realisasi	159,96% Rp. 105,94 M	189,23% Rp. 340,6 M	189,23% Rp. 340,6 M	227,87% Rp. 717,79 M	227,87% Rp. 717,79 M	109,61 Rp. 67,5 M	109,61% Rp. 764,47 M	
Capaian	159,96%	189,23%	189,23%	227,87%	227,87%	109,61	109,61%	
Nilai Kinerja	120%	120%	120%	120%	120%	109,61	109,61%	

	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
Target	Rp241.655.058.525 (3% dari total Nilai Outstanding Piutang Negara dengan Berkas s.d. 31 Desember 2016 /Realisasi PNDS dengan kriteria berkas sd 31 Desember 2016	Rp261.983.673.163,57	Rp341.159.212.641,00 kemudian terdapat adendum sehingga target menjadi Rp512.000.000.000,00
Realisasi	Rp167.069.926.416 (2,07% dari total Nilai Outstanding Piutang Negara dengan Berkas s.d. 31 Desember 2016 /Realisasi PNDS dengan kriteria berkas sd 31 Desember 2016	Rp485.564.042.443,12	Rp 698.862.787.052,95
Persentase capaian	69%	185,34%	136,50%

	Tahun 2023	Tahun 2024
Target	Rp345.000.000.000	Rp. 450.000.000.000 dan terdapat adendum sehingga menjadi Rp. 697.460.000.000
Realisasi	Rp723.854.222.707	Rp 764.471.984.032,15
Persentase capaian	209,81%	109,61%

IKU Persentase Penurunan Nilai Outstanding Piutang Negara baru diukur di Tahun 2020. Pada tahun 2024, IKU Persentase Jumlah Penurunan Outstanding Piutang Negara menggambarkan aspek kinerja pengurusan piutang negara yang ditandai dengan adanya penurunan outstanding Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN) atau nilai saldo piutang negara.

Kriteria pengakuan capaian atas IKU yaitu untuk seluruh BKPN yang ada pada aplikasi FocusPN, dengan komponen:

1. PNDS/Piutang Negara Dapat Disetor (Angsuran/Pembayaran (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat) atau Pelunasan (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat)
2. Penarikan (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat)
3. Pengembalian (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat)
4. PSBDT (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat)
5. Keringanan Utang yang dilunasi tahun berjalan,
6. Koreksi karena kekeliruan pencatatan dari Penyerah Piutang atau KPKNL, termasuk didalamnya apabila ada penyelesaian piutang negara melalui asset debt swap.

KPKNL Jakarta I berupaya melakukan penelitian lapangan untuk mencari keberadaan dan *debt tracing* aset sebagai upaya optimalisasi pengurusan Piutang Negara, melakukan koordinasi dengan penyerah Piutang untuk *Update* data informasi Debitur, melakukan pencegahan, SLIK OJK, penagihan melalui surat dan Melaksanakan lelang atas HKL/ barang jaminan debitur. Upaya-upaya tersebut akan terus dilakukan di tahun mendatang.

SS.4 Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien

8. Indeks Ketepatan Waktu Layanan Penilaian

K-Wide	SS.4 Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien							
	8. Indeks Ketepatan Waktu Layanan Penilaian							
T/R	Q1	Q2	Smt.I	Q3	s.d.Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	75	75	75	75	75	75	75	Max
Realisasi	91,7	93,75	93,75	84,34	84,34	96,33	96,33	/ TLK
Capaian	122,26%	125%	125%	112,45%	112,45%	128,44%	128,44%	
Nilai Kinerja	120%	120%	120%	112,45%	112,45%	120%	120%	

	Tahun 2020-2023*)	Tahun 2024
Target	N/A	75
Realisasi	N/A	96,33
Persentase capaian	N/A	128,44%

Pengukuran IKU ini baru ditetapkan pada Tahun 2024. Penilaian adalah suatu proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atau suatu objek penilaian pada saat tertentu. Ruang lingkup penilaian adalah Penilaian BMN berupa properti, penilaian bisnis, dan penilaian sumber daya alam. Dimulainya kegiatan penilaian diawali dengan surat/nota dinas masuk permohonan penilaian. Penyelesaian penilaian adalah terselesainya laporan penilaian dan disampaikan kepada pemohon.

Upaya yang dilakukan KPKNL Jakarta I dalam pencapaian kinerja ini yaitu berkoordinasi dengan unit-unit terkait dalam pelaksanaan penilaian dan menerapkan manajemen perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan penilaian sesuai dengan ketentuan, sehingga layanan penilaian dapat diselesaikan tepat waktu. Optimalisasi koordinasi ini akan terus ditingkatkan serta meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan penilaian.

SS.5 Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Lelang yang Efektif

9. Persentase BMN Berupa Tanah yang Disertipikatkan

K-Wide	SS.4 Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal							
	9.Persentase BMN Berupa Tanah yang Disertipikatkan							
T/R	Q1	Q2	Smt.I	Q3	s.d.Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	20%	40%	40%	60%	60%	100%	100%	Max/ TLK
Realisasi	20%	51,24%	51,24%	86,36%	86,36%	101,68%	101,68%	
Capaian	100%	128%	128%	143,93%	143,93%	101,68%	101,68%	
Nilai Kinerja	100%	120%	120%	120%	120%	101,68%	101,68%	

	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Target	0	100%	100%	100%	100%
Realisasi	0	45,45%	100%	111,15%	101,68%
Persentase capaian	-	45,45%	100%	111,15%	101,68%

Untuk Tahun 2024, target sertifikasi pada KPKNL Jakarta I adalah 2.859 NUP tanah BMN, rincian target nominatif K1 s.d K3 sebanyak 425 NUP tanah dan target validasi sebanyak 2.434 NUP tanah, dengan realisasi 101,68% atau penyelesaian mencapai 2.907 NUP tanah. Dimana Tingkat capaian IKU Sertifikasi tergantung pada capaian output, yakni output K1 berupa Sertipikat Hak Pakai (SHP), output K2 berupa Peta Bidang Tanah (PBT), output K3 berupa Pemblokiran/Input data pada Aplikasi Sentuh Tanahku/Produk Lainnya, output K4 berupa update data pada Master Aset SIMAN dan validasi pada fitur Validasi Sertipikasi Tanah (Valserah).

KPKNL Jakarta I telah melakukan beberapa koordinasi dengan Pihak terkait (Kanwil DJKN DKI Jakarta, Kantor Pusat DJKN dan Kantor Pertanahan), koordinasi dengan Satker yang menjadi target sertipikasi Tahun 2024 terkait perkembangan pelaksanaan sertipikasi BMN. Rencana kedepannya, KPKNL Jakarta I akan terus melakukan koordinasi dengan Satker dan Kantor Pertanahan secara rutin serta melakukan

monitoring perkembangan sertipikasi yang ditetapkan sebagai target tahun 2025

10. Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)

K-Wide	SS.5 Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Lelang yang Efektif							
	10. Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)							
T/R	Q1	Q2	Smt.I	Q3	s.d.Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	10%	32%	32%	80%	80%	100%	100%	Max/
Realisasi	17%	40,11%	40,11%	82,07%	82,07%	122,99%	122,99%	TLK
Capaian	170%	125,34%	125,34%	102,58%	102,58%	122,99%	122,99%	
Nilai Kinerja	120%	120%	120%	102,58%	102,58%	120%	120%	

	Tahun 2021	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Target	100% (98 NUP)	100% (157 NUP)	100%	100%	100%
Realisasi	100% (134 NUP)	103,82% (163 NUP)	103,82%	143,37%	122,99%
Persentase Capaian	136,73%	103,82%	103,82%	143,37%	122,99%

Evaluasi kinerja BMN merupakan kegiatan pengukuran kinerja suatu aset BMN yang dilakukan secara sistematis dan terukur dengan mempertimbangkan 6 indikator, yaitu kepentingan umum, manfaat sosial, kepuasan pengguna, potensi penggunaan masa mendatang, kelayakan finansial dan kondisi teknis. Realisasi IKU implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio aset) pada tahun 2024 dapat melampaui target yang telah ditetapkan, yaitu sebesar 122,99%. Tindakan yang telah dilaksanakan untuk mencapai adalah dengan melakukan koordinasi dengan Kanwil DJKN DKI Jakarta dan Direktorat PKKN serta koordinasi dengan Satuan Kerja yang BMN-nya menjadi target portofolio aset. Upaya ini akan terus dilaksanakan pada tahun mendatang.

SS.6 Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Produktif

11. Persentase Saldo Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)

K-Wide	SS.6 Penerapan Tata Kelola Piutang Negara Dan Lelang Yang Produktif							
	11. Persentase Saldo Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)							
T/R	Q1	Q2	Smt.I	Q3	s.d.Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	99%	96%	96%	93%	93%	88%	88%	Min/ TLK
Realisasi	98%	94,83%	94,83%	87,83%	87,83%	86,83%	86,83%	
Capaian	101,01%	101,22%	101,22%	105,56%	105,56%	101,68%	101,68%	
Nilai Kinerja	101,01%	101,22%	101,22%	105,56%	105,56%	101,68%	101,68%	

	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Target	33 BKPN	33 BKPN	40 BKPN	50 BKPN terdapat Addendum menjadi 51 BKPN	60 BKPN terdapat Addendum menjadi 73 BKPN
Realisasi	31 BKPN (nilai menjadi 34,5 dengan pembobotan)	71 BKPN	75 BKPN	61 BKPN	79 BKPN
Persentase capaian	104,55%	215,15%	187,50%	119,61%	101,68%

IKU Persentase efektivitas penyelesaian BKPN mulai diukur pada tahun 2020. Sebelumnya IKU ini merupakan komponen perhitungan untuk IKU Persentase hasil pengurusan piutang negara. IKU Persentase Penyelesaian BKPN menggambarkan aspek kinerja pengurusan piutang negara dari sisi penyelesaian BKPN. Kriteria pengakuan capaian atas masing-masing komponen yaitu penyelesaian BKPN diukur dengan penjumlahan:

- i. BKPN Lunas (SPPNL)
- ii. BKPN Penarikan (SPPNS)
- iii. BKPN Dikembalikan (SKPBN), dan
- iv. BKPN Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT).
- v. Koreksi Data (BKPN Lunas/Penarikan/Dikembalikan/PSBDT tahun berjalan dan tahun sebelumnya yang belum tercatat).

Realisasi Jumlah BKN yang Dapat Diselesaikan pada Tahun 2024 sebanyak 79 BKN dari target 73 BKN. Persentase capaian mencapai 101,68%. KPKNL Jakarta I telah melakukan penelitan lapangan untuk mencari keberadaan dan *debt tracing* aset sebagai upaya optimalisasi pengurusan Piutang Negara, melakukan koordinasi dengan penyerah Piutang untuk *update* data informasi Debitur serta melakukan pencegahan, SLIK OJK, penagihan melalui surat. Upaya ini akan terus dilakukan dan dimaksimalkan pada tahun mendatang.

12.Persentase Produktivitas Lelang

K-Wide	SS.6 Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian Akuntabel, Inklusif dan Berkelanjutan							
	12.Persentase Produktivitas Lelang							
T/R	Q1	Q2	Smt.I	Q3	s.d.Q3	Q4	Y-24	Pol/ KP
Target	30%	45%	45%	60%	60%	89%	89%	Max /TLK
Realisasi	61,73%	84,98%	84,98%	62,52%	62,52%	89,66%	89,66%	
Capaian	205,77%	188,84%	188,84%	104,20%	104,20%	100,74%	100,74%	
Nilai Kinerja	120%	120%	120%	104,20%	104,20%	100,74%	100,74%	

	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Target	34%	35%	36%	80%	89%
Realisasi	37,43%	39,41%	45,47%	131,25%	89,66%
Persentase capaian	110,08%	112,61%	126,31%	164,06%	100,74%

Realisasi IKU Presentase produktivitas lelang pada Tahun 2024 adalah 89,66% dengan persentase capaian sebesar 100,74%. Capaian tersebut lebih besar dibandingkan target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 89%. Produktivitas lelang dinilai dari 2 komponen dengan bobot 40% dari seberapa intensitas frekuensi lelang yang laku dari per jenis lelang, yaitu dengan membandingkan lot lelang yang laku per jenis lelang, jumlah lot lelang laku per jenis lelang dengan jumlah jenis lelang yang dilaksanakan) dan 60% dari perbandingan jumlah realisasi frekuensi lelang.

Upaya yang telah dilaksanakan diantaranya KPKNL Jakarta I

menghimbau pemohon lelang untuk, mengajukan permohonan dengan memprioritaskan objek lelang yang berstatus *free & clear serta marketable*, menetapkan nilai limit berdasarkan laporan penilaian yang masih berlaku dengan memperhatikan potensi daya laku, melakukan pemasaran obyek lelang secara intensif dan melakukan AYDA (bagi kreditur perbankan). Rencana di tahun mendatang, KPKNL Jakarta I juga akan melaksanakan sosialisasi permohonan lelang online untuk lelang eksekusi, lelang non eksekusi wajib dan dilakukan penggalan potensi lelang.

SS.7 Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional

13.Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian

K-Wide	SS.5 Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional							
	13. Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian							
T/R	Q1	Q2	Smt.I	Q3	s.d.Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	Min/TLK
Realisasi	0,91%	0,24%	0,24%	0,14%	0,14%	0,09%	0,09%	
Capaian	193,31%	198,50%	198,50%	199,13%	199,13%	199,44%	199,44%	
Nilai Kinerja	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Target	30%	22%	19%	25%	16%
Realisasi	4,21%	1,90%	4,35%	13,50%	0,09%
Persentase capaian	185,98%	191,36%	177,11%	146%	199,44%

IKU Deviasi ketergunaan hasil penilaian mulai diukur pada Tahun 2020. Deviasi ketergunaan hasil penilaian dilakukan untuk mengukur selisih antara nilai yang digunakan sebagai dasar dalam persetujuan yang ditetapkan oleh Pengelola Barang dibandingkan dengan nilai hasil penilaian yang disampaikan kepada Pengelola Barang terhadap objek BMN yang sama. Perhitungan deviasi dilakukan terhadap setiap persetujuan yang objeknya dimintakan penilaian.

Capaian deviasi ketergunaan hasil penilaian adalah rata-rata dari

jumlah deviasi dari tiap-tiap persetujuan yang ditetapkan Pengelola Barang yang objeknya dimintakan penilaian. Realisasi IKU Deviasi ketergunaan hasil penilaian pada Tahun 2024 adalah sebesar 0,09 % dari target 16 % sehingga capaiannya sebesar 199,44% (polarisasi IKU minimize atau pencapaian semakin kecil akan semakin bagus).

Upaya yang telah dilakukan KPKNL Jakarta I yaitu meningkatkan koordinasi antara penilai dan pengelola BMN dalam setiap kegiatan penilaian, secara konsisten melakukan penilaian dengan kualitas yang tinggi dan dapat dipertanggungjawabkan ketergunaannya dalam keputusan pengelolaan BMN serta melakukan sosialisasi kepada satuan kerja terkait metode penaksiran usulan pengelolaan BMN. Pada tahun mendatang, beberapa rencana diantaranya penggunaan data historis ketergunaan persetujuan pengelolaan BMN untuk kegiatan penilaian selanjutnya, tetap menjaga kualitas hasil penilaian, menghasilkan nilai yang dapat dipertanggungjawabkan ketergunaannya dalam keputusan pengelolaan BMN.

SS.8 Pengelolaan Organisasi dan SDM yang Adaptif

14. Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai

K-Wide	SS.8 Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							
	14. Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai							
T/R	Q1	Q2	Smt.I	Q3	s.d.Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	45%	60%	60%	80%	80%	90%	90%	Max/TLK
Realisasi	69,73%	81,28%	81,28%	109,71%	109,71%	113,50%	113,50%	
Capaian	154,96%	135,47%	135,47%	137,14%	137,14%	126,11%	126,11%	
Nilai Kinerja	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Target	100%	100%	100%	100%	90%
Realisasi	120%	120%	120%	120%	113,50
Persentase capaian	120%	120%	120%	120%	126,11%

IKU Persentase Pengembangan Potensi Pegawai ini mengukur dua

komponen yaitu Kualitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kebintalan dan Kualitas Pemenuhan Standard Jam Pelatihan bagi Pegawai. IKU Progam Kebintalan bertujuan untuk mewujudkan implementasi kebintalan di lingkungan Kementerian Keuangan melalui program/kegiatan kebintalan, sehingga pegawai menerapkan sikap dan perilaku/kebiasaan yang mencerminkan 4 (empat) bidang bintal yakni bintal ideologi, bidang rohani, bidang kompetensi, bidang kejiwaan berdasarkan KMK No.467/KMK.01/2023 tentang Pembinaan Mental di Lingkungan Kementerian Keuangan, sehingga terbentuk pegawai Kementerian Keuangan yang berjiwa nasionalisme, berintegritas, unggul, dan memiliki kesehatan fisik dan mental yang optimal. IKU Pemenuhan Standar Jam Pelatihan bagi pegawai mengukur persentase banyaknya pegawai (bawahannya) yang telah memenuhi standar pengembangan pegawai dan telah sesuai dengan perencanaan pengembangannya.

Bawahan telah memenuhi kriteria bila memenuhi minimal 40 JP, minimal 1 dari usulan rencana Pengembangan Kompetensi pada modul DKI telah dilaksanakan, dan minimal 1 yang sesuai dengan tugas dan fungsi. KPKNL Jakarta I telah melakukan penyusunan program kebintalan, penyebarluasan kalender DJKN agar diikuti oleh pegawai dan akan dilanjutkan rencana yang akan dilaksanakan yaitu memastikan seluruh pegawai menyusun *Individual Development Plan (IDP)* Tahun 2025 dan melakukan pemantauan atas Nota Dinas Seditjen hal pemanggilan diklat dan menginfokan kepada pegawai yang bersangkutan.

15. Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko

K-Wide	SS.8 Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							
	15. Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko							
T/R	Q1	Q2	Smt.I	Q3	s.d.Q3	Q4	Y-24	Pol/ KP
Target	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	Max/TLK
Realisasi	85%	96,38%	96,38%	98,50%	98,50%	99,33%	99,33%	
Capaian	100%	113,39%	113,39%	115,88%	115,88%	116,86%	116,86%	
Nilai Kinerja	100%	113,39%	113,39%	115,88%	115,88%	116,86%	116,86%	

	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Target	70	75	80	80	85
Realisasi	99,33	95,43	99,17	97,20	99,33
Persentase capaian	114,68%	127,24%	123,96%	121,50%	116,86%

IKU Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko bertujuan Untuk memastikan keberhasilan pencapaian tujuan reformasi birokrasi dan keberhasilan pencapaian perencanaan strategis, maka diperlukan sistem penilaian kinerja sebagai bagian dari sistem pengelolaan kinerja dan Manajemen Risiko di lingkungan Kementerian Keuangan pada Tahun 2022 IKU ini merupakan IKU nilai review Pengelolaan Kinerja sehingga pada Tahun 2024 terjadi perubahan Formula pada IKU ini. Formula IKU Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko Tahun 2024 sebagai berikut :

$$\text{Indeks pengelolaan kinerja dan kualitas manajemen risiko} = (\text{Nilai Reviu Pengelolaan Kinerja} \times 60\%) + (\text{Indeks Kualitas Manajemen Risiko} \times 40\%)$$

Review Pengelolaan dilaksanakan dengan melakukan penilaian terhadap empat aspek pengelolaan kinerja, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan/eksekusi, monitoring dan evaluasi dan intensitas edukasi pengelolaan kinerja. Kedepannya KPKNL Jakarta I akan lebih teliti dalam membuat laporan manajemen risiko agar mendapat capaian yang maksimal.

SS.9 Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel

16. Indeks Kualitas Pelaksanaan Anggaran

K-Wide	SS.9 Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel							
	16. Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran							
T/R	Q1	Q2	Smt.I	Q3	s.d.Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Max/TLK
Realisasi	120%	107,44%	107,44%	113,67%	113,67%	120%	120%	
Capaian	120%	107,44%	107,44%	113,67%	113,67%	120%	120%	
Nilai Kinerja	120%	107,44%	107,44%	113,67%	113,67%	120%	120%	

	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Target	95%	95,5%	95,5%	100	100%
Realisasi	100%	94,48%	95,28%	113,33	120%
Persentase capaian	105,26%	98,93%	99,77%	113,33%	120%

Realisasi Indeks Kualitas Pelaksanaan Anggaran pada Tahun 2024 adalah sebesar 120 dari target sebesar 100 sehingga capaiannya adalah sebesar 120% telah melampaui dari target yang ditetapkan. KPKNL Jakarta I terus melakukan pemutakhiran rencana penarikan dana secara berkala pada setiap unit.

17. Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN

K-Wide	SS.9 Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel							
	17. Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN							
T/R	Q1	Q2	Smt.I	Q3	s.d.Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	Min/TLK
Realisasi	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0,09%	
Capaian	200%	200%	200%	200%	200%	200%	200%	
Nilai Kinerja	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Target	-	12,50%	10,00%	15%	10%
Realisasi	-	0,00%	0,00%	1%	0,09%
Persentase capaian	-	200,00%	200,00%	193,33%	200%

IKU Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN merupakan IKU mulai diukur pada Tahun 2021. Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN, diukur dari:

- 1) Selisih Total Data Realisasi PNBP Bidad PPN MAP 425785 pada aplikasi Focus PN dengan Total Data Realisasi PNBP Bidad PPN MAP 425785 pada aplikasi OM SPAN/Hasil Rekon KPPN.
- 2) Selisih Total Data Realisasi PNBP Bea Lelang PL I MAP 425782 pada aplikasi Dropbox dengan Total Data Realisasi PNBP Bea Lelang PL I MAP 425782 pada aplikasi OM SPAN/Hasil Rekon KPPN.

Realisasi Data PNBP Fungsional DJKN pada Tahun 2024 adalah

sebesar 0,09% dari target 10% (polarisasi IKU minimize atau pencapaian semakin kecil akan semakin bagus). KPKNL Jakarta I telah melakukan inputing data PNBPNP sesuai dengan ketentuan, dan secara periodik melakukan Analisa gap/ deviasi, dan segera melakukan langkah koreksi yang diperlukan apabila terjadi gap, dan menyelesaikan permasalahan tersebut sebelum periode pelaporan. Kedepannya, KPKNL Jakarta I menjaga konsistensi input data PNBPNP dan analisis gapnya.

SS.10 Penguatan Pengawasan Pengendalian Internal yang Efektif

18. Komunikasi publik yang efektif (PPID)

K-Wide	SS.10 Penguatan Pengawasan Pengendalian Internal yang Efektif							
	18. Komunikasi publik yang efektif (PPID)							
T/R	Q1	Q2	Smt.I	Q3	s.d.Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	80	80	80	80	80	80	80	Max/TLK
Realisasi	120	116	116	116	116	116	116	
Capaian	154%	145%	145%	145%	145%	145%	145%	
Nilai Kinerja	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

	Tahun 2020 s.d. 2023	Tahun 2024
Target	N/A	80
Realisasi	N/A-	116
Persentase Capaian	N/A	145%

Pengelolaan Informasi Publik pada seluruh unit Kementerian Keuangan berlandaskan pada UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan PMK Nomor 110 Tahun 2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan. Adapun kewajiban yang dimiliki oleh pelaksana PPID DJKN (PPID Tingkat II dan/atau PPID Tingkat III) adalah penyampaian informasi publik, pelaporan pengelolaan layanan informasi publik, dan penunjukan petugas pengelola layanan informasi publik.

Pengukuran IKU ini baru dilakukan pada tahun 2024. Target untuk KPKNL Jakarta I untuk IKU ini adalah sebesar 80, dapat direalisasikan

dengan nilai 116, dan nilai capaian 145% di atas target. KPKNL Jakarta I selalu menyelenggarakan PPID sesuai ketentuan, dan bertindak aktif responsive terhadap permohonan informasi publik. Serta akan terus menjaga konsistensi penyelenggaraan PPID sesuai dengan ketentuan.

SS.11 Penguatan Pengawasan Pengendalian Internal yang Efektif

19. Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif

K-Wide	SS.1 Pengawasan dan Pengendalian Internal yang bernilai tambah							
	19. Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif Indeks efektivitas UKI							
T/R	Q1	Q2	Smt.I	Q3	s.d.Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	5	15	15	20	20	82	82	Max/TLK
Realisasi	5	15	15	20	20	99,76	99,76	
Capaian	100%	100%	100%	100%	100%	121,66%	121,66%	
Nilai Kinerja	100%	100%	100%	100%	100%	120%	120%	

	Tahun 2020-2022****)	Tahun 2023	Tahun 2024
Target	N/A	60	82
Realisasi	N/A	93.31	99,76
Persentase capaian	-	155.52%	121,66%

IKU Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif ini merupakan penyempurnaan dari IKU serupa pada periode tahun 2023. Indeks efektivitas UKI adalah indeks untuk mengukur efektivitas pelaksanaan tugas UKI yang membantu manajemen untuk memantau implementasi pengendalian intern di lingkungan Kementerian Keuangan. Indeks efektivitas UKI diukur dengan skala 1 s.d. 100, dan menggunakan 3 komponen sebagai berikut:

A. Komponen Pengungkit (Bobot 25%)

1. Komitmen Pimpinan (7,5%)

Subkomponen ini mengukur komitmen pimpinan terhadap pelaksanaan tugas UKI.

2. Dukungan Sumber Daya Manusia (7,5%)

Subkomponen ini mengukur kecukupan jumlah dan kompetensi SDM

UKI

3. Akses Data dan Informasi (5%)

Subkomponen ini mengukur akses UKI atas data & informasi terkait proses bisnis yang dipantau.

4. Komunikasi (5%)

Subkomponen ini mengukur pelaksanaan komunikasi UKI dengan pimpinan dan pegawai di unit kerjanya, dengan UKI di tingkat atasnya, maupun dengan Itjen (Auditor Mitra/Tim Pembina UKI)

B. Komponen Proses (25%)

1. Pemilihan Probis yang dipantau (4%)

Subkomponen ini mengukur pelaksanaan pemilihan proses bisnis yang dipantau oleh UKI.

2. Penyusunan RCM dan Fraud Risk Scenario (FRS) (4%)

Subkomponen ini mengukur penyusunan RCM dan FRS yang dilakukan oleh UKI.

3. Profiling Pegawai (4%)

Subkomponen ini mengukur kesesuaian penyusunan profil pegawai UKI serta tindak lanjut atas profil yang disusun.

4. Penyusunan Program Kerja (3%)

Subkomponen ini mengukur program kerja yang disusun oleh UKI dalam rangka pemantauan.

5. Pelaksanaan Pemantauan (3%)

Subkomponen ini mengukur pelaksanaan pemantauan Pengendalian Intern serta tindak lanjut hasil pemantauannya.

6. Penarikan Simpulan Pengendalian Internal (3%)

Subkomponen ini mengukur penarikan simpulan efektivitas pengendalian intern dari hasil pemantauan pengendalian intern yang dilakukan oleh UKI.

7. Pelaporan Pengendalian Internal (4%)

Subkomponen ini mengukur proses penyusunan dan penyampaian laporan hasil pemantauan yang dilaksanakan oleh UKI.

C. Komponen Hasil (Bobot 50%)

1. Penanganan Pengaduan Masyarakat (15%)

Subkomponen ini mengukur efektivitas penanganan pengaduan masyarakat terkait dengan integritas dan perilaku pegawai (fraud dan non fraud) yang dapat ditindaklanjuti berdasarkan hasil verifikasi, serta penyelesaian pengaduan yang dilimpahkan oleh Inspektorat Jenderal.

2. Penyelesaian Laporan informasi pada Aplikasi J3Li (15%)

Subkomponen ini mengukur efektivitas penyelesaian laporan informasi yang ditujukan kepada UKI pada Aplikasi J3Li

3. Kejadian Tangkap Tangan (20%)

Subkomponen ini mengukur kontribusi UKI atas kejadian tangkap tangan oleh Itjen dan APH, maupun fraud yang ada di unit

Upaya pada KPKNL Jakarta I telah menjaga efektifitas kegiatan UKI KPKNL Jakarta I dan terus akan mempertahankan konsistensi efektifitas UKI.

B.Kinerja Lainnya

1. *Parameter Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI)*

a. *Komposisi Pegawai*

JENIS KELAMIN	Golongan				JUMLAH
	I	II	III	IV	
Perempuan	-	-	11	3	14
Laki-laki	-	2	17	4	23
TOTAL	-	2	28	7	37

Pegawai pada KPKNL Jakarta I berjumlah 37 orang, diantaranya terdiri dari 14 perempuan dan 23 laki-laki. Meskipun saat ini KPKNL Jakarta I dominan terhadap laki-laki secara jumlah, namun KPKNL Jakarta I memastikan bahwa prinsip kesetaraan gender diterapkan baik dalam kebijakan maupun dalam layanan kepada masyarakat. Beberapa langkah yang diambil diantaranya yaitu:

1. KPKNL Jakarta I membentuk Tim Kerja Implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala KPKNL Jakarta I Nomor KEP-3/KNL.0701/2024 tentang Pembentukan Tim Kerja

Penguatan Implementasi Pengarusutamaan Gender Tahun Anggaran 2024 pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta I.

2. KPKNL Jakarta I berupaya menciptakan menerapkan sikap dan perilaku/kebiasaan yang mencerminkan empat bidang Bimbingan Mental (bintal), yakni bidang ideologi, bidang rohani, bidang kompetensi, dan bidang kejiwaan berdasarkan KMK Nomor 467/KMK.01/2023 tentang Pembinaan Mental di Lingkungan Kementerian Keuangan, dengan mengadakan Kajian Bintal Muslimah. Tujuan Kegiatan muslimah ini dilaksanakan untuk membentuk sumber daya manusia yang beriman, bertakwa, dan sehat di lingkungan Kanwil DJKN DKI Jakarta. Kegiatan yang pernah dilakukan dengan berkolaborasi bersama Kanwil DJKN DKI Jakarta diantaranya:

(a). Kegiatan Bintal dengan Tema "Muslimah Sehat, Cantik, dan Bugar (Healthy and Beauty Inside, Beauty Outside) diisi dengan sharing session pola hidup sehat oleh Praktisi Kesehatan, dr. Yulia Murti Andani dan demo kosmetik oleh Wardah Cosmetic Team, Selvi Ayu.



(b). Kegiatan Bintal dengan Tema tema "Gizi Seimbang, Produktivitas Berkembang" oleh oleh Rahmi Dwi Hapsari, S.GZ, RD selaku Dietisien RSCM.



3. Memberikan kesempatan yang sama bagi pegawai perempuan untuk mengembangkan kompetensi melalui pelatihan juga kesempatan dalam berkarir.
4. Menyediakan fasilitas yang ramah gender pada Area Pelayanan Terpadu (APT) KPKNL Jakarta I seperti kursi roda untuk disabilitas, ruang menyusui dan ruang tunggu anak, parkir khusus wanita dan disabilitas, dan jalan pemandu disabilitas.



i. Peran Aktif KPKNL Jakarta I



Pada kesempatan ini, salah satu pegawai pada KPKNL Jakarta I melakukan sosialisasi terkait tugas dan fungsi yang ada pada DJKN pada SMK Negeri 3 Kota Bandung sebagai guru tamu sebagai upaya

mendukung proses pembelajaran yang berkolaborasi dengan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja (DUDIKA) pada SMK Negeri 3 Kota Bandung.

2. Penghargaan pada KPKNL Jakarta I



Pada Tahun 2024, KPKNL Jakarta I mendapat penghargaan dari Bank Syariah Indonesia, Tbk Regional Retail Collection & Recovery V Jakarta 2 pada tanggal 25 Maret 2024 atas kerjasama antara KPKNL Jakarta pada kegiatan lelang.

C. Realisasi Anggaran

Untuk membiayai kegiatan di lingkungan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta I dalam Tahun 2024 telah dialokasikan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2024. Dari keseluruhan anggaran yang tersedia (PAGU akhir) yaitu sebesar Rp 2.441.747.000 pada tahun 2024, dapat terealisasi sebesar Rp 2.215.559.127 dari pagu yang telah ditetapkan.

Target Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran tahun 2024 sebesar 100%, dan dapat terealisasi sebesar 120%. Sehingga pada Tahun 2024 Target Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran dapat terpenuhi.

BAB IV – PENUTUP

Laporan Kinerja KPKNL Jakarta I ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian pelaksanaan visi dan misi DJKN serta upaya peningkatan *good governance*. Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja.

Pada Tahun 2024 tugas pengelolaan kekayaan negara, piutang negara, lelang dan penilaian semakin berat dan penuh tantangan. Namun demikian, jajaran KPKNL Jakarta I senantiasa berusaha menghadapi tantang tersebut, sehingga tugas yang diberikan dapat dilaksanakan sesuai dengan harapan. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian IKU secara keseluruhan pada Tahun 2024 sudah sesuai dengan target yang ditetapkan, walaupun masih terdapat 1 (satu) IKU yang realisasinya belum mencapai target yang ditentukan.

Langkah-langkah ataupun strategi yang akan dilakukan KPKNL Jakarta I dalam upaya memperbaiki kinerja dan menghadapi tantangan ke depan, antara lain:

1. Dalam Pengelolaan Kekayaan Negara:
 - a. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap persetujuan pengelolaan BMN yang ditertibkan oleh KPKNL Jakarta I selaku Pengelola Barang.
 - b. Menyampaikan laporan pengawasan dan pengendalian periodik secara tepat waktu.
2. Dalam Penerimaan Piutang Negara
 - a. Melakukan penggalan potensi penerimaan dari Piutang Negara sehingga outstanding Piutang Negara dapat ditekan.
 - b. Melakukan penelitian lapangan untuk mencari keberadaan dan tracing aset dalam upaya pengoptimalan pengurusan Piutang Negara.
3. Dalam Pelayanan Lelang
 - a. Melakukan penggalan potensi lelang, termasuk lelang UMKM
 - b. Melakukan koordinasi dengan *stakeholder* lelang untuk mengoptimalkan

pelaksanaan AYDA

4. Dalam Pelayanan Penilaian

- Berkoordinasi dengan unit-unit terkait dalam pelaksanaan penilaian
- Menerapkan manajemen perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan penilaian sesuai ketentuan sehingga pelaksanaan penilaian dapat tepat waktu.

5. Dalam pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM):

- c. Melakukan pengelolaan sumber daya manusia (SDM) secara efektif.
- d. Meningkatkan kualitas SDM agar dapat memberikan pelayanan yang lebih baik lagi bagi pengguna jasa.

Akhirnya dengan disusunnya Laporan Kinerja KPKNL Jakarta I ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan baik kepada pimpinan Kementerian Keuangan maupun kepada seluruh pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi KPKNL Jakarta I, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya.

Kepala Kantor,



Ditandatangani secara elektronik

Rofii Edy Purnomo



LAMPIRAN

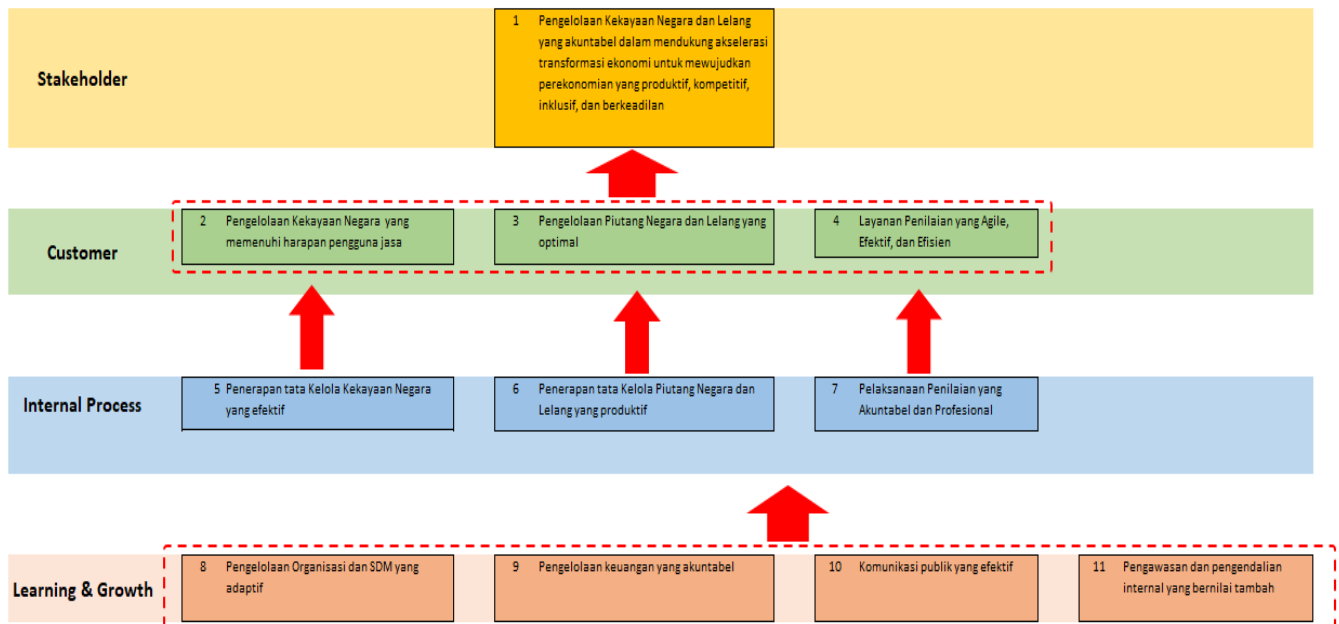


PERJANJIAN KINERJA
NOMOR: PK-01/WKN.07/2024
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN
LELANG JAKARTA I
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024

VISI DJKN

Menjadi Pengelola Kekayaan Negara yang Profesional dan Akuntabel dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan: Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan, serta untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Peta Strategi



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2024
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
JAKARTA I
KEMENTERIAN KEUANGAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan.	1a-CP Tingkat Kepuasan <i>Stakeholder</i> dan Pengguna Layanan	100
		1b-CP Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100 (Rp116.5 M)
		1c-CP Indeks integritas	89.17
2	Pengelolaan Kekayaan Negara yang memenuhi harapan pengguna jasa	2a-CP Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	71.5
		2b-CP Tingkat efektivitas Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara	86.5
3	Pengelolaan Piutang Negara dan Lelang yang optimal	3a-CP Persentase realisasi pokok lelang	100 (Rp 570.3 M)
		3b-CP Persentase penurunan nilai <i>outstanding</i> Piutang Negara	100 (Rp 450 M)
4	Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien	4a-CP Indeks ketepatan waktu penyelesaian layanan Penilaian	75
5	Penerapan tata kelola Kekayaan Negara yang efektif	5a-CP Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100
		5b-CP Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100
6	Penerapan tata kelola Piutang Negara dan Lelang yang produktif	6a-CP Persentase saldo BKPN	90 (540)
		6b-CP Persentase produktivitas lelang	89
7	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional	7a-CP Deviasi ketergunaan hasil penilaian	16



No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
8	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	8a-N Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	85
		8b-N Persentase pengembangan kompetensi pegawai	90
9	Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel	9a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100
		9b-CP Deviasi data PNBPFungsional DJKN	10
10	Komunikasi publik yang efektif	10a-N Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)	80
11	Pengawasan dan Pengendalian Internal yang bernilai tambah	11a-N Indeks efektivitas UKI	82

Program/ Kegiatan Tahun 2024

Anggaran

1.	Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko	Rp	539.747.000
2.	Dukungan Manajemen	Rp	1.763.720.000
Kegiatan			
3.	Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi	Rp	17.163.000
4.	Pengelolaan Aset	Rp	522.584.000
5.	Legislasi dan Litigasi	Rp	48.321.000
6.	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp	1.690.727.000
7.	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	Rp	4.080.000
8.	Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	Rp	20.592.000

Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan
Negara DKI Jakarta

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan
Lelang Jakarta I



Ditandatangani Secara Elektronik
Mahmudsyah



Ditandatangani Secara Elektronik
Rofii Edy Purnomo



**RINCIAN TARGET KINERJA
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
JAKARTA I
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024**

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan.							
1a-CP	Tingkat Kepuasan <i>Stakeholder</i> dan Pengguna Layanan	20	50	50	70	70	100	100
1b-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100	100	100	100	100	100	100 100
1c-CP	Indeks Integritas	-	-	-	-	-	89,17	89,17
2	Pengelolaan kekayaan negara yang memenuhi harapan pengguna jasa							
2a-CP	Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	-	50	50	60	60	71,5	71,5
2b-CP	Tingkat efektivitas Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN	-	45	45	-	-	86,5	86,5
3	Pengelolaan Piutang Negara dan Lelang yang optimal							
3a-CP	Persentase realisasi pokok lelang	100	100	100	100	100	100	100
3b-CP	Persentase penurunan nilai <i>outstanding</i> Piutang Negara	100	100	100	100	100	100	100
4	Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien							
4a-CP	Indeks ketepatan waktu penyelesaian layanan Penilaian	75	75	75	75	75	75	75
5	Penerapan tata kelola Kekayaan Negara yang efektif							



Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
5a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	-	40	40	60	60	100	100
5b-CP	Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	10	32	32	80	80	100	100
6	Penerapan tata kelola Piutang Negara dan Lelang yang produktif							
6a-CP	Persentase saldo BKPN	99	96	96	93	93	90	90
6b-CP	Persentase produktivitas lelang	30	45	45	60	60	89	89
7	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional							
7a-CP	Deviasi ketergunaan hasil penilaian	16	16	16	16	16	16	16
8	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							
8a-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	85	85	85	85	85	85	85
8b-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	10	60	60	75	75	90	90
9	Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel							
9a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	100	100	100	100	100	100
9b-CP	Deviasi data PNBPN Fungsional DJKN	10	10	10	10	10	10	10
10	Komunikasi publik yang efektif							
10a-N	Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)	80	80	80	80	80	80	80
11	Pengawasan dan Pengendalian Internal yang bernilai tambah							
11a-N	Indeks efektivitas UKI	-	-	-	-	-	82	82



Jakarta, 30 Januari 2024
Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara
Dan Lelang Jakarta I,



Ditandatangani Secara Elektronik
Rofii Edy Purnomo



SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2024

PEGAWAI YANG DINILAI		PEJABAT PENILAI KINERJA		
NAMA	Rofii Edy Purnomo, S.H.,M.H.	NAMA	Mahmudsyah	
NIP	197104101997031003	NIP	196407161991031001	
PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Tingkat I, IV/b	PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama Madya, IV/d	
JABATAN	Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Jakarta I	JABATAN	Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara DKI Jakarta	
UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DKI Jakarta	UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DKI Jakarta	
NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. UTAMA				
1.	Pengelolaan Kekayaan Negara dan lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara DKI Jakarta)	Tingkat Kepuasan <i>Stakeholder</i> dan Pengguna Layanan	100	Stakeholder
2.	Pengelolaan Kekayaan Negara dan lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif,	Persentase realisasi penerimaan negara dari	100	Stakeholder



	inklusif, dan berkeadilan (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara DKI Jakarta)	pengelolaan kekayaan negara dan lelang		
3.	Pengelolaan Kekayaan Negara dan lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara DKI Jakarta)	Indeks integritas	89.17	Stakeholder
4	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DKI Jakarta)	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	71.5	Customer
5	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DKI Jakarta)	Tingkat Efektifitas Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara	86.5	Customer
6.	Pengelolaan Piutang Negara dan Lelang yang Optimal (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DKI Jakarta)	Persentase Realisasi Pokok Lelang	100	Customer
7	Pengelolaan Piutang Negara dan Lelang yang Optimal (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DKI Jakarta)	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	100	Customer



8	Layanan penilaian yang agile, efektif, dan efisien (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DKI Jakarta)	Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian	75	Customer
9	Penerapan tata kelola kekayaan negara yang efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DKI Jakarta)	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100	Internal Process
10	Penerapan tata kelola kekayaan negara yang efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DKI Jakarta)	Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100	Internal Process
11.	Penerapan tata kelola piutang negara dan lelang yang produktif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DKI Jakarta)	Persentase saldo BKPN	90	Internal Process
12.	Penerapan tata kelola piutang negara dan lelang yang produktif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DKI Jakarta)	Persentase produktivitas lelang	89	Internal Process
13.	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DKI Jakarta)	Deviasi Ketergunaan hasil Penilaian	16	Internal Process
14.	Pengelolaan organisasi dan SDM adaptif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara DKI Jakarta)	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	85	Learning and Growth Anggaran
15.	Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara)	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	90	Learning and Growth



	DKI Jakarta)			
16.	Pengelolaan keuangan yang akuntabel (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DKI Jakarta)	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	Learning and Growth
17.	Pengelolaan keuangan yang akuntabel (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DKI Jakarta)	Deviasi data PNBPN Fungsional DJKN	10	Learning and Growth
18.	Komunikasi publik yang efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DKI Jakarta)	Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)	80	Learning and Growth
19.	Pengawasan dan pengendalian internal yang bernilai tambah (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara DKI Jakarta)	Indeks efektivitas UKI	82	Learning and Growth
B. TAMBAHAN				

PERILAKU KERJA				
1	Berorientasi pelayanan			
	<ul style="list-style-type: none"> - Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti 	Ekspektasi Khusus Pimpinan:		Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa



PERILAKU KERJA		
		membeda-bedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.
2	Akuntabel	
	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>
3	Kompeten	
	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.</p>
4	Harmonis	
	<ul style="list-style-type: none"> - Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p>
5	Loyal	
	<ul style="list-style-type: none"> - Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p>



PERILAKU KERJA		
	<p>Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara - Menjaga rahasia jabatan dan negara 	<p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>
6	Adaptif	
	<ul style="list-style-type: none"> - Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan - Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas - Bertindak proaktif 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.</p>
7	Kolaboratif	
	<ul style="list-style-type: none"> - Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi - Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah - Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p>



Jakarta, 30 Januari 2024

Pejabat Penilai Kinerja,

Pegawai yang Dinilai,



Ditandatangani secara elektronik

Rofii Edy Purnomo
197104101997031003



Ditandatangani secara elektronik

Mahmudsyah
196407161991031001



LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2024

DUKUNGAN SUMBER DAYA								
1.	41 pegawai							
2.	<i>Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/laptop, alat tulis, dan lain-lain.</i>							
SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN								
1.	<i>Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan</i>							
No	IKI	Target						
		Q1	Q2	Smt.1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Tingkat Kepuasan <i>Stakeholder</i> dan Pengguna Layanan	20	50	50	70	70	100	100
2	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100	100	100	100	100	100	100
3	Indeks integritas	-	-	-	-	-	89,17	89,17
4	Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	-	50	50	60	60	71.5	71.5
5	Tingkat efektivitas Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN	-	45	45	-	-	86.5	86.5
6	Persentase realisasi pokok lelang	100	100	100	100	100	100	100



7	Persentase penurunan <i>outstanding</i> Piutang Negara	100	100	100	100	100	100	100
8	Indeks ketepatan waktu penyelesaian layanan Penilaian	75	75	75	75	75	75	75
9	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	-	40	40	60	60	100	100
10	Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	10	32	32	80	80	100	100
11	Persentase saldo BKPN	99	96	96	93	93	90	90
12	Persentase produktivitas lelang	30	45	45	60	60	89	89
13	Deviasi ketergunaan hasil penilaian	16	16	16	16	16	16	16
14	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	85	85	85	85	85	85	85
15	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	10	60	60	75	75	90	90
16	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	100	100	100	100	100	100
17	Deviasi data PNBPN Fungsional DJKN	10	10	10	10	10	10	10
18	Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)	80	80	80	80	80	80	80
19	Indeks efektivitas UKI	-	-	-	-	-	82	82



KONSEKUENSI	
1.	<i>Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.</i>
2.	<i>Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.</i>

Jakarta, 30 Januari 2024

Pegawai yang Dinilai,

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani secara elektronik

Rofii Edy Purnomo
197104101997031003



Ditandatangani secara elektronik

Mahmudsyah
196407161991031001



ADENDUM PERJANJIAN KINERJA

NOMOR: 01A/WKN.07/2024

Pada hari ini, telah disepakati adendum atas Perjanjian Kinerja Nomor: PK-01/WKN.07/2024 tanggal 30 Januari 2024, dengan rincian sebagai berikut:

Perubahan Lampiran Indikator Kinerja Individu

Kode IKU	Indikator Kinerja Individu	Sebelum							Menjadi								
		Target							Kode IKU	Indikator Kinerja Individu	Target						
Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Q1	Q2			Smt .1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y		
1c-CP	Indeks Integritas	-	-	-	-	-	89,17	89,17	1C-CP	Indeks integritas	10	20	20	30	30	89,17	89,17
2a-CP	Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	-	50	50	60	60	71,5	71,5	2a-CP	Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	30	50	50	60	60	71,5	71,5
2b-CP	Tingkat efektivitas Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN	-	45	45	-	-	86,5	86,5	2b-CP	Tingkat efektivitas Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN	10	45	45	60	60	86,5	86,5

Sebelum									Menjadi								
Kode IKU	Indikator Kinerja Individu	Target							Kode IKU	Indikator Kinerja Individu	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y			Q1	Q2	Smt .1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
5a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	-	40	40	60	60	100	100	5a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	20	40	40	60	60	100	100
8a-CP	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	10	60	60	75	75	90	90	8a-CP	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	45	60	60	80	80	90	90
11a-N	Indeks efektivitas UKI	-	-	-	-	-	82	82	11a-N	Indeks efektivitas UKI	5	15	15	20	20	82	82

Jakarta, 31 Mei 2024

Menyetujui,
Kepala Kanwil DJKN DKI Jakarta,

Kepala KPKNL Jakarta I



Ditandatangani Secara Elektronik
Mahmudsyah



Ditandatangani Secara Elektronik
Rofii Edy Purnomo



ADENDUM SASARAN KINERJA PEGAWAI

Pada hari ini, telah disepakati adanya adendum atas Sasaran Kinerja Pegawai Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta I dan Teknologi tanggal 30 Januari 2024, dengan rincian sebagai berikut:

Perubahan Lampiran Sasaran Kinerja Pegawai

		Sebelum							Menjadi								
Kode IKU	Indikator Kinerja Individu	Target							Kode IKU	Indikator Kinerja Individu	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y			Q1	Q2	Smt .1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
1c-CP	Indeks Integritas	-	-	-	-	-	89,17	89,17	1C-CP	Indeks integritas	10	20	20	30	30	89,17	89,17
2a-CP	Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	-	50	50	60	60	71,5	71,5	2a-CP	Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	30	50	50	60	60	71,5	71,5
2b-CP	Tingkat efektivitas Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN	-	45	45	-	-	86,5	86,5	2b-CP	Tingkat efektivitas Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN	10	45	45	60	60	86,5	86,5

Sebelum									Menjadi								
Kode IKU	Indikator Kinerja Individu	Target							Kode IKU	Indikator Kinerja Individu	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y			Q1	Q2	Smt .1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
5a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	-	40	40	60	60	100	100	5a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	20	40	40	60	60	100	100
8a-CP	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	10	60	60	75	75	90	90	8a-CP	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	45	60	60	80	80	90	90
11a-N	Indeks efektivitas UKI	-	-	-	-	-	82	82	11a-N	Indeks efektivitas UKI	5	15	15	20	20	82	82

Jakarta, 31 Mei 2024

Pejabat yang dinilai,

Pejabat penilai kinerja,



Ditandatangani Secara Elektronik
Rofii Edy Purnomo



Ditandatangani Secara Elektronik
Mahmudsyah



ADENDUM PERJANJIAN KINERJA

NOMOR: 01B/WKN.07/2024

Pada hari ini, telah disepakati adendum atas Perjanjian Kinerja Nomor: PK-01/WKN.07/2024 tanggal 30 Januari 2024 yang telah diubah sesuai dokumen adendum Perjanjian Kinerja Nomor: PK-01A/ WKN.07/2024 tanggal 31 Mei 2024, dengan rincian sebagai berikut:

A. Perubahan Indikator Kinerja Utama

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Semula			Menjadi		
			Indikator Kinerja	Target		Indikator Kinerja	Target
3	Pengelolaan Piutang Negara dan Lelang yang optimal	3b-CP	Persentase penurunan nilai outstanding Piutang Negara	100 (450 M)	3b-CP	Persentase penurunan nilai outstanding Piutang Negara	100 (697,46 M)
6	Penerapan tata kelola Piutang Negara dan Lelang yang produktif	6a-CP	Persentase saldo BKPN	90 (540 berkas)	6a-CP	Persentase saldo BKPN	88 (527 berkas)

B. Perubahan Rincian Target Kinerja

Sebelum									Menjadi								
Kode IKU	Indikator Kinerja Individu	Target							Kode IKU	Indikator Kinerja Individu	Target						
		Q1	Q2	S.d. Q2	Q3	S.d. Q3	Q4	Y			Q1	Q2	S.d. Q2	Q3	S.d. Q3	Q4	Y
6a-CP	Persentase saldo BKPN	99	96	96	93	93	90	90	6a-CP	Persentase saldo BKPN	99	96	96	93	93	88	88

Jakarta, 20 November 2024

Menyetujui,
Kepala Kantor Wilayah DJKN DKI Jakarta,

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta I



Ditandatangani secara elektronik
Arif Bintarto Yuwono



Ditandatangani secara elektronik
Rofii Edy Purnomo

ADENDUM SASARAN KINERJA PEGAWAI

Pada hari ini, telah disepakati adanya adendum atas Sasaran Kinerja Pegawai Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta I tanggal 30 Januari 2024 yang telah diubah sesuai dokumen adendum Sasaran Kinerja Pegawai tanggal 31 Mei 2024, dengan rincian sebagai berikut:

A. Perubahan Sasaran Kinerja Pegawai

Semula				
No.	Rencana Hasil Kerja	Indikator Kinerja Individu	Target	Perspektif
7	Pengelolaan Piutang Negara dan Lelang yang Optimal (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DKI Jakarta)	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	100 (450 M)	Penerima Layanan
11	Penerapan tata kelola piutang negara dan lelang yang produktif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DKI Jakarta)	Persentase saldo BKPN	90 (540 berkas)	Proses Bisnis
Menjadi				
No.	Rencana Hasil Kerja	Indikator Kinerja Individu	Target	Perspektif
7	Pengelolaan Piutang Negara dan Lelang yang Optimal (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DKI Jakarta)	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	100 (697,46 M)	Penerima Layanan
11	Penerapan tata kelola piutang negara dan lelang yang produktif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DKI Jakarta)	Persentase saldo BKPN	88 (527 berkas)	Proses Bisnis

B. Perubahan Lampiran Sasaran Kinerja Pegawai

Sebelum									Menjadi								
No.	Indikator Kinerja Individu	Target							No.	Indikator Kinerja Individu	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y			Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
11	Persentase saldo BKPN	99	96	96	93	93	90	90	11	Persentase saldo BKPN	99	96	96	93	93	88	88

Jakarta, 20 November 2024

Pejabat yang dinilai,

Pejabat penilai kinerja,



Ditandatangani secara elektronik
Rofii Edy Purnomo



Ditandatangani secara elektronik
Arif Bintarto Yuwono



STRUKTUR ORGANISASI

